

ISSN 1829-8001

Terakreditasi Nomor: 10/E/KPT/2019



*Jurnal Penelitian*

**POLITIK**

Vol.16, No.2, Desember 2019

## EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019

- Formula Konversi Suara Sainte Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019
- Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia
- Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019
- Penyederhanaan Partai Politik Melalui *Parliamentary Threshold*: Pelanggaran Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat
- Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019
- Ujaran Kebencian, *Hoax* dan Perilaku Memilih(studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia)
- Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi
- Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara

### REVIEW BUKU

- Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi

Jurnal Penelitian  
Politik

Vol. 16

No. 2

Hlm. 111-235

Jakarta,  
Desember 2019

ISSN  
1829-8001



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praktis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)  
Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP, M.A. (*Ahli Gender dan Politik*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)  
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI  
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

**Dewan Redaksi**

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)  
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

**Redaksi Pelaksana**

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)  
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

**Sekretaris Redaksi**

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si  
Sutan Sorik, SH

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom  
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com  
*Website*: [www.politik.lipi.go.id](http://www.politik.lipi.go.id) | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

**ISSN**

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	i
<b>Catatan Redaksi</b>	iii
<b>Artikel</b>	
• <b>Formula Konversi Suara Saint Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019</b> Mouliza K.D Sweinstani	111–124
• <b>Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia</b> Moch. Nurhasim	125–136
• <b>Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019</b> Muhammad Imam Subkhi	137–154
• <b>Penyederhanaan Partai Politik melalui <i>Parliamentary Threshold</i>: Penyelenggaraan Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat</b> Jerry Indrawan dan M. Aji	155–166
• <b>Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019</b> Chastiti M.W dan Edward S.R	167–178
• <b>Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilih Presiden 2019 di Indonesia)</b> Ferdinand Eskol Tiar Sirait	179–190
• <b>Problematis Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi</b> Muhammad Nuh Ismanu	191–207
• <b>Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara</b> Sri Yanuarti	209–228
<b>Review Buku</b>	
• <b>Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi</b> Sutan Sorik	229–235
<b>Tentang Penulis</b>	236–237

## CATATAN REDAKSI

Untuk pertama kalinya, Indonesia menggelar pemilu serentak. Pemilu 2019 menyatukan lima jenis pemilihan sekaligus yakni pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Pemilu serentak semula dianggap lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun anggaran. Namun demikian, dalam prakteknya, pemilu serentak menyisakan sejumlah persoalan yang juga menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan delapan artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan pemilu dan partai politik. Artikel pertama yang ditulis oleh Mouliza K.D Sweinstani berjudul FORMULA KONVERSI SUARA SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA PADA SISTEM KEPARTAIAN: EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019. Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitugan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d'Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan

perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

Artikel berikutnya, PARADOKS PEMILU SERENTAK 2019: MEMPERKOKOH MULTIPARTAI EKSTREM DI INDONESIA ditulis oleh Moch Nurhasim membahas mengenai Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

Evaluasi pemilu serentak 2019 juga dapat dilihat dari sisi pendaftaran pemilih. Artikel berjudul REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019 ditulis oleh Imam Subkhi membahas mengapa DPT untuk

Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui.

Artikel selanjutnya membahas tentang PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT yang ditulis oleh Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji mengulas tentang dinamika PT. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

Artikel berjudul MEREDAM KONFLIK DALAM PUSARAN SIBER DALAM PROSES PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILU SERENTAK 2019 ditulis oleh Chastiti

Mediafira Wulolo dan Edward Samuel Renmaur membahas mengenai konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Artikel berikutnya berjudul UJARAN KEBENCIAN, HOAX DAN PERILAKU MEMILIH (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI INDONESIA) ditulis oleh Ferdinand Eskol Tiar Sirait membahas mengenai dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara petahana Joko Widodo. Tulisan ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah dimana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variabel anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

Artikel selanjutnya berjudul PROBLEMATIK REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILU SERENTAK 2019: ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI ditulis oleh Muhammad Nuh Ismanu membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi

dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan studi kasus pada suatu Kelurahan di Kota Depok, diketahui pada Kelurahan tersebut terdapat celah antara regulasi dengan implementasi dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan celah tersebut mendatangkan persoalan dalam tataran implementasi.

Artikel terakhir berjudul **PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK: PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA** ditulis oleh Sri Yanuarti. Artikel ini menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar prakek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan review buku karya Syamsuddin Haris, dkk, “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi”. Review yang ditulis Sutan Sorik mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor keamanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai kepemiluan. Selamat membaca.

Redaksi

---

**DDC: 324.6598**

**Mouliza K.D Sweinstani**

**FORMULA KONVERSI SUARA  
SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA  
PADA SISTEM KEPARTAIAN:  
EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 111-124**

Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitungan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d'Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

---

**Kata Kunci:** Formula Elektoral, Hare LR, Sainte Lague, Sistem Kepartaian

---

**DDC: 324.9598**

**Moch. Nurhasim**

**PARADOKS PEMILU SERENTAK  
2019: MEMPERKOKOH  
MULTIPARTAI EKSTREM DI  
INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 125-136**

Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

**Kata kunci:** Pemilu Serentak, Multipartai Ekstrem, Penataan Sistem Pemilu

---

**DDC: 324.6598**

**Muhammad Imam Subkhi**

**REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 137-154**

Salah satu syarat untuk dapat memilih adalah menjadi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan, daftar ini tampaknya menjadi masalah klasik yang belum pernah diselesaikan, termasuk DPT untuk Pemilu Serentak 2019. Menggunakan metode kualitatif, makalah ini membahas mengapa DPT untuk Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui. Di masa depan, komisi pemilihan juga harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara. Selain itu, komisi harus lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan, aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci :** pemilu, daftar pemilih, pendaftaran pemilih berkelanjutan, data pemilih yang mutakhir dan akurat, penyelenggara pemilu

---

**DDC: 324.6598**

**Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji**

**PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 155-166**

Sejak pemilu 2009, aturan Ambang Batas Parlemen (PT) sudah mulai diterapkan secara nasional di dengan tujuan mengurangi parpol yang lolos di DPR. Diharapkan aturan ini dapat menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dirasa sudah terlalu banyak. Namun, pertentangan terhadap aturan ini muncul karena PT terkesan melanggar kedaulatan rakyat dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi calon legislatif untuk duduk di parlemen pusat, sekalipun berhasil meraih kursi di daerah pemilihannya, hanya karena parpolnya tidak lolos ambang batas secara nasional. Angka 4% yang ditetapkan sebagai ambang batas penulis anggap sebagai pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini karena angka tersebut ditentukan hanya melalui proses kompromi elit, bukan kajian ilmiah, maupun lewat aspirasi masyarakat, yang tetap dapat menjaga tegaknya kedaulatan rakyat. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

**Kata Kunci:** Ambang Batas Parlemen, Penyederhanaan Parpol, dan Kedaulatan Rakyat

---

**DDC: 324.9598**

**Chastiti Mediafira Wulolo, Edward  
Semuel Renmaur**

**MEREDAM KONFLIK DALAM  
PUSARAN SIBER DALAM PROSES  
PENETAPAN HASIL REKAPITULASI  
PEMILU SERENTAK 2019**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 167-  
178**

Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah kontestasi politik di Indonesia. Berbagai cara dihalalkan oleh masing-masing kubu untuk meraih suara. Namun hal yang disesalkan adalah penggunaan isu-isu SARA yang dipolitisasi untuk saling menjatuhkan elektabilitas kompetitornya. Konflik besar yang terjadi pasca deklarasi Pemilu menjadi sorotan penting bagi peneliti, karena muncul konflik pada ranah siber yang dinilai berperan signifikan pada stabilitas keamanan dalam negeri jelang pengumuman rekapitulasi suara Pemilu serentak. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang apa saja konflik yang terjadi di ranah siber dan faktor apa saja yang menjadi pemicu serta bagaimana resolusi untuk meredam konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis yang dipadu dengan pendekatan kualitatif dalam menggali berbagai perspektif tentang konflik pada ranah siber jelang pengumuman rekapitulasi Pemilu 2019. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan dan menelusuri berbagai informasi terkait melalui literatur, jurnal, buku dan dokumen relevan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

---

**Kata Kunci:** Deklarasi Pemilu, Peperangan Siber, Peperangan Informasi, Resolusi Konflik

---

**DDC: 324.9598**

**Ferdinand Eskol Tiar Sirait**

**UJARAN KEBENCIAN, HOAX  
DAN PERILAKU MEMILIH:  
(STUDI KASUS PADA PEMILIHAN  
PRESIDEN 2019 DI INDONESIA)**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. No.2, Desember 2019, hlm. 179-190**

Pilpres 2019 adalah pengulangan dari kontestasi 2 (dua) kandidat yang sebelumnya bertarung pada pilpres 2014. Kontestasi pilpres 2019 diwarnai dengan meluasnya penggunaan ujaran kebencian dan hoax, dimana salah satu medium terbesar dalam penyebarannya adalah pada media sosial. Sebagaimana hasil-hasil penelitian terdahulu, kampanye negatif dan hitam terutama diarahkan pada petahana. Penggunaan media sosial dan berita daring sebagai medium kampanye negatif dan hitam ini dikarenakan media sosial dan portal berita daring memiliki fitur-fitur yang sulit dikendalikan oleh petahana. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini mencoba melihat dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara capres petahana Joko Widodo. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah di mana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variable anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

**Kata Kunci:** ujaran kebencian, hoax, media digital, perilaku memilih, pilpres

---

**DDC: 324.6598**

**Muhammad Nuh Ismanu**

**PROBLEMATIK REKRUTMEN  
PENYELENGGARA PEMILU**

## **DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILU SERENTAK 2019 : ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 191-207**

Dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum terdapat penyelenggara yang memiliki peran penting sebagai petugas pemilihan di tingkat bawah, yaitu pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penyelenggara dimaksud adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau yang disebut juga dengan Pantarlih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diketahui bahwa Pantarlih memiliki peran sebagai pelaksana proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dan KPPS memiliki peran sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Faktor yang akan menentukan dalam pemenuhan kualifikasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan tersebut adalah rekrutmen. Tulisan ini bermaksud membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

**Kata Kunci:** Proses Rekrutmen; Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS; Pemilu Serentak 2019.

---

**DDC: 324.2**

**Sri Yanuarti**

## **PENDANAAN KEPADA PARTAI POLITIK: PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 209-228**

Partai politik di banyak negara demokrasi memiliki fungsi yang sangat strategis. Banyak rekrutmen pejabat publik maupun lembaga perwakilan senantiasa melibatkan partai politik. Sayangnya dari masa ke masa korupsi politik yang dilakukan oleh politisi maupun partai politik kian marak baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara. Alasan klise

yang selalu dimunculkan sebagai faktor pendorong terjadinya korupsi oleh para politisi dan partai politik karena biaya kontestasi pemilu dari tahun ke tahun semakin mahal. Selain itu partai politik seringkali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai kegiatan. Untuk menutupi berbagai kegiatannya seringkali partai politik maupun politisi mengandalkan dana dari para donatur yang mempunyai sumber daya keuangan besar di luar partainya, seperti sektor swasta dan korporasi. Akibatnya pada saat ini sektor swasta dan korporasi mempunyai kesempatan untuk memainkan peran politik yang semakin penting di dalam partai politik. Sayangnya donor seringkali mengharapkan semacam kompensasi atas sumbangan yang diberikan selama kampanye di masa pemilihan untuk mendapatkan keuntungan. Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar praktek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

**Kata Kunci:** Partai Politik, Demokrasi, Pendanaan Negara

---

**DDC 321.8**

**Sutan Sorik**

## **REVIEW BUKU : MENIMBANG DEMOKRASI DUA DEKADE REFORMASI**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 229-235**

Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor keamanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

**Kata kunci:** Menimbang Demokrasi, Dua Dekade Reformasi

---

**DDC: 324.6598**

**Mouliza K.D Sweinstani**

**THE SAINTE LAGÜE FORMULA  
AND ITS IMPACT ON THE PARTY  
SYSTEM: EVALUATION OF 2019  
CONCURRENT ELECTION**

**Journal of Political Research**

*Vol. 16, No.2, December 2019, Page 111-124*

*In a democratic country, the choice of the electoral system needs to be chosen and formulated comprehensively because each has different political consequences. No exception in Indonesia, changes in the electoral system in the 2019 elections also have their own consequences. One interesting change to be studied further is the change in the electoral formula from Hare LR to Sainte Lague (SLM). By simulating the calculation of the Hare LR formula, SLM, and two other alternatives, namely d'Hondt and Hungarian Sainte Lague, it is known that SLM has an impact that is almost identical to the Hare LR in terms of the number of potential political parties elected. SLM still has great potential to produce extreme multi-parties because this formula cannot optimally simplify the selected political parties. This condition certainly makes the change is still not in line with the interests of strengthening the presidential system that requires the simplification of the party. Therefore, this study recommends the need to change the electoral formula in the proportional list system implemented in Indonesia. With regard to LSq and BONUSRAT, this study recommends the Hungarian Sainte Lague formula as an alternative electoral formula that can be used in Indonesia.*

**Keywords:** Electoral Formula, Hare LR, Sainte Lagüe, Party System

---

**DDC: 324.9598**

**Moch. Nurhasim**

**THE PARADOX OF SIMULTANEOUS  
ELECTIONS IN 2019:  
STRENGTHENING EXTREME  
MULTIPARTY IN INDONESIA**

**Journal of Political Research**

*Vol. 16, No.2, December 2019, Page 125-136*

*Simultaneous elections 2019 are believed by a number of people to have a significant impact on the improvement of the political system in Indonesia. The impact is a consequence of the operation of coattail effect on the one hand and the political efficacy on the other hand when the election is synchronized. But the results of the 2019 elections actually show different evidence, because the assumption of the implementation of the election scheme simultaneously precisely misses and is not proven. There are errors in assumptions and in understanding the theoretical and practical contexts in several countries, causing the 2019 simultaneously election design building look "haphazard". As a result, the election results are almost no different from elections with the legislative election scheme preceding the presidential election, or a separate election. This is due to the fact that the compilers of the 2019 Election Law at the same time rely solely on simultaneity, and do not see the interconnectedness of the system and no change in the electoral system, so that simultaneous elections produce extreme multiparty parties. The results reinforce criticism that proportional elections that are not accompanied by fundamental technical changes, are unlikely to encourage moderate multiparty.*

**Keywords:** Simultaneous Elections, Extreme Multiparty, Electoral System Structuring

---

**DDC: 324.6598**

**Muhammad Imam Subkhi**

**REDESIGN OF VOTERS'  
REGISTRATION DURING 2019 POST-  
ELECTION**

**Journal of Political Research**

**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 137-154**

*One of the requirements to be able to vote is to be registered in the Permanent Voter's List (DPT). In fact, this list seems to be a classic problem that has never been solved including the DPT for the 2019 Concurrent Election. Using qualitative method, this paper discusses why the DPT for the 2019 Election is still problematic, even being sued in court, and how to overcome this problem. Even though the Law No. 7/2017 about Election stipulates voter registration using the method of continuous voter registration, the implementation of this method has not met the prerequisites. There are, at least, eleven preconditions that should be fulfilled. The Election Law does not regulate who is responsible to update voter's data during post-election period. In addition, the Indonesian General Election Commission also has not organized mechanism to update the voters' data after the 2019 Election. This condition contributes to the 'limping' of updated voters' data during the post-election period. Ideally, the Election Law should be able to facilitate the electoral commission to manage government of updated sustainable voters' data. In the future, the electoral commission should also be adequate to build cooperation among state institutions. Also, the commission should approach voters to realize integrated, inclusive, comprehensive, accurate, accessible, informed, transparent, secure, private, effective, acceptable, accountable, participatory, and sustainable voters' list.*

*Keywords: elections, voter list, sustainable voter's registration, updated and accurate voters' data, electoral commission.*

---

**DDC: 324.6598**

**Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji**

**POLITICAL PARTY  
SIMPLIFICATION THROUGH  
PARLIAMENTARY THRESHOLD:  
SYSTEMATIC VIOLATION OF  
PEOPLE'S**

**Journal of Political Research**

**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 155-166**

*Since the 2009 election, Parliamentary Threshold (PT) has begun to be applied nationally with the aim of reducing the political parties that qualify to DPR. It is expected that this regulation can simplify the number of political parties which are considered too many. However, opposition to this rule arises because PT seems to violate people's sovereignty by not providing an opportunity for legislative candidates to sit in the central parliament, even though they have won seats in their electoral districts, just because their political parties have not passed national thresholds. The 4% figure set as the threshold considered to be a systematic violation of people's sovereignty. This is because the figure is determined only through an elite compromise process, not a scientific study, or through people's aspirations, who can still maintain people's sovereignty. During the last two elections since the PT was implemented, the number of political parties in Indonesia has not diminished, but has increased. This condition further confirms PT's failure in the simplification process of political parties. The purpose of this research is to show that PT is not able to simplify the number of political parties. This research was carried out through qualitative research methods, by taking data through secondary sources, namely books, journals, and other texts. The author also conducted interviews with several experts who were expected to provide input related to this research. The research finding is that simplification process of political parties are not suppose to be conducted based on PT, but through chair reduction in every electoral district, that is not violating people's sovereignty.*

*Keywords: Parliamentary Threshold, Political Party Simplification, and People Sovereignty*

---

**DDC: 324.9598**

**Chastiti Mediafira Wulolo, Edward  
Semuel Renmaur**

**REDUCING CONFLICT IN THE  
CIRCLE OF CYBER BEFORE THE  
ANNOUNCEMENT OF THE 2019  
SIMULTANEOUS ELECTIONS  
RECAPITULATION RESULTS**

**Journal of Political Research**

**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 167-178**

*The simultaneous election in 2019 is the largest democratic party in the history of political contestation in Indonesia. Some various ways are done by each supporters to gain votes. However the politicization of ethnic, religious, racial and inter-group issues to overthrow the electability of its competitors is regrettable. The major conflict that*

occurred after the Declaration of Election became an important spotlight for researchers, because conflicts in cyber domain which were considered to have a significant role in the stability of internal security ahead of the announcement of simultaneous election recapitulation results. Therefore, this study will discuss about conflicts that occur in the cyber domain, trigger factors and how the resolution to reduce the conflict. This study used descriptive research methods combined with a qualitative approach to explore various perspectives in the domain of cyber conflict after the declaration of the 2019 Election. The method of data collection is done by interviewing a number of informants and tracing various related information through literature, journals, books and other relevant documents. Based on the results of the research it was found that the conflicts that occurred in the cyber domain were a type of information warfare that used hoax issues around the election to influence the perspectives of the Indonesian people. The factor that triggered the conflict was the weak system of holding the simultaneous election and the ambitions of each candidate which justified various ways to win the election. The conflict resolution offered is using technical actions and policies that are implemented in the circle of cyber and for the parties concerned. In the end, this research is expected to be an implementable solution and especially useful to reduce conflict in the circle of cyber before the announcement of the 2019 simultaneous election recapitulation results.

**Keywords:** Declaration of Elections, Cyber Warfare, Information Warfare, Conflict Resolution.

---

**DDC: 324.9598**  
**Ferdinand Eskol Tiar Sirait**

### **HATE SPEECH, HOAX, AND VOTING BEHAVIOR: (CASE STUDY ON 2019 PRESIDENTIAL ELECTIONS IN INDONESIA)**

**Journal of Political Research**  
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 179-190**

The 2019 presidential election was a re-run of the 2 (two) candidates who had previously competed in the 2014 presidential election. The 2019 presidential contest was marked by the widespread use of black campaigns in the form of hate speech and hoax disseminated mainly through social media. As some research suggests, black and negative campaigns are mainly launched against the incumbent. The use of social media and online news portals as the medium of the campaign is understandable given the social media and online news provide some features not

easily controlled by the incumbents. Using empirical qualitative method, the research investigates the impact of black campaign on vote share of the incumbent president Joko Widodo. The results indicate that to some extent, the campaign has a limited impact on the vote share. The impact is quite obvious in the region where the sociological factors play important role in shaping vote choice. It has no impact on the region where psychological factors (i.e., party affinity) influence the vote. In short, the results suggest that sociological or psychological factors are the antecedent variable conditioning the impact of black campaign on the vote share.

**Keywords:** Hoax Campaign, Media digital, Voting Behaviour, Presidential Election

---

**DDC: 324.6598**  
**Muhammad Nuh Ismanu**

### **PROBLEMATIC OF ELECTORAL MANAGEMENT BODIES' RECRUITMENT IN THE 2019 GENERAL ELECTIONS : BETWEEN REGULATION AND IMPLEMENTATION**

**Journal of Political Research**  
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 191-207**

In the managing of election there are electoral management bodies (EMBs) that have an important role as election officials at the lower level, namely voting booth level (TPS/Tempat Pemungutan Suara). This bodies referred to the PPDP (Voter Data Update Officer) or also known as Pantarlih and KPPS (Votting Organizing Group/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Based on Law No. 7 of 2017 about General Elections it can be seen that Pantarlih has a role as the executor of the registration process and updating voter data and the KPPS has a role as the executor of polling and counting of votes at polling stations. The factor that will determine the fulfillment of the HR (Human Resources) qualifications needed in filling these positions is recruitment. This paper discuss about the recruitment of election administrators at the voting booth level at the 2019 concurrent elections in the aspects of regulation with their implementation. The discussion is expected to provide a picture of reality in the election implementation at the TPS level and can be input for evaluating the holding of 2019 concurrent elections.

**Keywords:** Recruitment Process; Election Organizer at the TPS Level; 2019 Concurrent Elections.

---

**DDC: 324.2**  
**Sri Yanuarti**

**STATE FUNDING TO POLITICAL  
PARTIES: EXPERIENCE IN  
SELECTED COUNTRIES**

**Journal of Political Research**  
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 209-  
228**

*Political parties in democratic countries have very strategic functions. Many public officials and representative institutions are always involved by political parties. Unfortunately, from time to time political corruption by politicians and political parties is increasingly prevalent both in Indonesia and in various countries. The cost of election contestation from year to year is increasingly expensive is a reason that is always raised as a motivating factor for corruption by politicians and political parties. To cover their various activities in election contestation, political parties and politicians often rely on funds from donors who have large financial resources outside their parties, such as the private sector and corporations. As a result, the private sector and corporations currently have the opportunity to play an increasingly important political role within political parties. Unfortunately donors often expect some kind of compensation for donations made during election campaigns for profit. This paper will describe and to analysis the arrangement of state funds for political parties from various countries as a lesson learnt. That is important to practices of regulating political funds and direct state financial assistance for political parties can minimize the adverse effects that occur through more appropriate strategies. The countries that are used as a reference in this paper are Germany and America, South Korea, Turkey and Chile and Brazil.*

**Keywords:** Party Politic, Democracy, State Funding

---

**DDC: 321.8**  
**Sutan Sorik**

**BOOK REVIEW: CONSIDERING  
DEMOCRACY TWO DECADES OF  
REFORM**

**Journal of Political Research**  
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 229-  
235**

*This paper reviews a book written by fifteen researchers at the Indonesian Institute of Sciences Political Research Center with editor Syamsuddin Haris, about weighing democracy in two decades of reform. The review focuses on four things, namely about reform towards the democratic system, reform of the representative system, elections, and party, security sector reform, reform of central-regional relations, decentralization, and local politics.*

**Keywords:** Considering Democracy, Two Decades of Reform

---

**REVIEW BUKU**  
**MENIMBANG DEMOKRASI DUA DEKADE REFORMASI**

***BOOK REVIEW***  
***CONSIDERING DEMOCRACY TWO DECADES OF REFORM***

**Sutan Sorik**

Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI)  
Email: [sutan.sorik98@gmail.com](mailto:sutan.sorik98@gmail.com)

Diterima: 10 Oktober 2019, Direvisi: 10 November 2019, Disetujui: 19 Desember 2019

Judul Buku : Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi  
Editor : Syamsuddin Haris  
Penulis : Aisah Putri Budiatri, Diandra Megaputri Mengko, Firman Noor, Irine Hiraswari Gayatri, Lili Romli, Lucky Sandra Amalia, Moch Nurhasim, Muhammad Haripin, Kurniawati Hastuti Dewi, Ridho Imawan Hanafi, Sarah Nurani Siregar, Sri Nuryanti, Sri Yanuarti, Syamsuddin Haris, Yogi Setya Permana.  
Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Tahun Terbit : 2019  
Tebal : 556 + xxviii

***Abstract***

*This paper reviews a book written by fifteen researchers at the Indonesian Institute of Sciences Political Research Center with editor Syamsuddin Haris, about weighing democracy in two decades of reform. The review focuses on four things, namely about reform towards the democratic system, reform of the representative system, elections, and party, security sector reform, reform of central-regional relations, decentralization, and local politics.*

**Keywords:** *Considering Democracy, Two Decades of Reform*

**Abstrak**

Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor keamanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

**Kata kunci:** Menimbang Demokrasi, Dua Dekade Reformasi

**Pendahuluan**

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) khususnya Pusat Penelitian Politik (P2P) memiliki komitmen untuk ikut membenahi bangsa

Indonesia ke arah yang lebih baik. Komitmen tersebut yang melatar belakangi 19 peneliti P2P LIPI pada masa Orde Baru meminta Presiden Soeharto mundur pada tanggal 20 Januari 1998.

Untuk melihat sejauh mana pencapaian terhadap apa yang telah diperjuangkan 19 peneliti P2P tersebut pada duapuluh tahun yang lalu, maka Syamsuddin Haris berinisiasi dan menggerakkan para peneliti di P2P LIPI untuk menulis buku *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi*.<sup>1</sup>

Setelah reformasi ada kebanggaan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, tetapi kalau dilihat dari realitas yang ada selama dua dekade reformasi jang-jangan hanya kebanggaan semu saja. Masih banyak kegagalan penegakan hukum dan hak asasi manusia, misalnya kasus Novel Baswedan dan konflik di Papua. Ada banyak kasus korupsi, misalnya yang dilakukan oleh kalangan pimpinan partai (Anas Urbaningrum dan Setya Novanto). Ada kegelisahan yang kembali muncul dengan mulai masuknya militer aktif dalam jabatan-jabatan sipil, bahkan baru-baru ini muncul peraturan presiden tentang jabatan fungsional bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif. Kemudian ada indikasi kuat mengenai pembiaran negara atas tindakan diskriminasi, persekusi, dan rasis yang dilakukan oleh individu, kelompok ataupun golongan minoritas, baik minoritas agama, minoritas etnik atau minoritas yang lain, ada apa ini ?.

Pertanyaanya apakah demokrasi dua dekade reformasi ini memang untuk korupsi ?, demokrasi yang diperjuangkan oleh reformis, apakah untuk memperkaya diri pribadi, golongan tertentu, konglomerat ataupun pebisnis gelap ?. Apa yang sebenarnya yang menjadi akar permasalahan bangsa Indonesia ini pasca reformasi ?. Dalam buku ini para pembahas mengulas persoalan-persoalan ini.

## Pembahasan

Naskah buku *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi* terbagi kedalam empat subtema, yaitu:

1. Subtema pertama tentang reformasi menuju sistem demokrasi.

---

<sup>1</sup> Syamsuddin Haris. *Speech, Peluncuran dan Bedah Buku "Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi"*, Pusat Penelitian Politik LIPI, Auditorium Gedung Widya Graha LIPI, Lantai 1, September 12, 2019.

2. Subtema kedua tentang reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian.
3. Subtema ketiga tentang reformasi sektor keamanan.
4. Subtema keempat tentang reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

Subtema pertama pada buku ini berusaha menimbang sejumlah isu besar, diantaranya pencapaian demokrasi Indonesia setelah dua dekade, yang kemudian diulus ke dalam empat bab. Bab pertama ditulis oleh Syamsuddin Haris. Haris berpendapat bahwa demokrasi Indonesia masih terperangkap sebagai demokrasi elektoral dan elitis yang bersifat prosedural. Artinya, di satu sisi pemilu-pemilu semakin bebas, demokratis, dan bahkan langsung, namun disisi lain akuntabilitas para penyelenggara negara dan kualitas tata kelola pemerintahan tak kunjung membaik. Bahkan menurut Haris, dalam beberapa waktu mutakhir, perkembangan demokrasi Indonesia bahkan mengalami stagnasi, bukan semata-mata karena dibajak oleh para elit oligarkis di pusat dan daerah, tetapi juga akibat maraknya korupsi, serta inkonsistensi dan lemahnya penegakan hukum oleh negara. Bab kedua ditulis oleh Firman Noor, membahas tentang kiprah umat Islam sebagai mayoritas sosiologis dalam konteks tarik-menarik sekaligus interaksi antara demokrasi, Islam, dan kebangsaan. Noor berpendapat bahwa meningkatnya daya tawar politik umat Islam di era demokrasi tidak ditujukan untuk menegakkan Islam formal, contohnya khilafah islamiyah, melainkan untuk pemeliharaan dan penegakan nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman. Meski ada sebagian umat Islam yang cenderung eksklusif, intoleran atau ekstrem, menurut Noor, mereka tidak mewakili pandangan umat Islam Indonesia pada umumnya. Bab ketiga ditulis oleh Moch Nurhasim, yang mengajukan gugatan akademik mengapa meningkatnya perkembangan demokrasi pasca-Orde Baru justru berbanding lurus dengan maraknya fenomena korupsi, oleh karenanya menurut Nurhasim ancaman korupsi sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan demokrasi Indonesia kedepan. Selain itu Nurhasim berpendapat

bahwa demokrasi Indonesia pasca-Orde Baru terlalu berorientasi pembangunan struktural, sebagian bahkan tambal-sulam. Pembangunan demokrasi mengabaikan urgensi pelebagaan kultur demokrasi dan perubahan sistem nilai yang mendukung demokrasi Indonesia. Bab terakhir pada subtema ini di tulis oleh Irine Hiraswari Gayatri, membahs tentang politik negara terhadap minoritas di Indonesia yang cenderung ambivalen dan inkonsistensi. Menurut Gayatri keniscayaan Indonesia yang inklusif sebagaimana diamanahkan konstitusi, namun dalam realitasnya berbagai kelompok minoritas agama dan etnik masih saja mengalami diskriminasi yang cenderung dibiarkan berlangsung oleh negara.

Menurut Greg Fealy<sup>2</sup> banyak sekali pengamat politik meyakini bahwa demokrasi di Indonesia sekarang mengalami kemunduran. Banyak istilah yang dipakai dalam menggambarkan posisi ini, misalnya demokrasi regresi, iliberal, demokrasi otokratis dan sebagainya. Intinya adalah demokrasi Indonesia tidak lebih baik dibandingkan dengan sepuluh atau lima belas tahun yang lalu. Kondisi ini dapat dilihat dari maraknya kasus korupsi, pelanggaran HAM bagi kaum minoritas, penegakan hukum yang tidak adil, dan sebagainya.

Namun demikian, menurut Greg Fealy jika melihat Indonesia pada konteks internasional sebenarnya posisinya masih lebih baik. Kemunduran demokrasi adalah fenomena universal, tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, seperti negara Thailand, Filipina, India, Mesir, tetapi juga terjadi di Amerika Serikat, Inggris, dan juga Australia. Bahkan Amerika Serikat dalam dua tiga tahun terakhir tidak termasuk dalam kategori *full democracies*. Padahal negara Amerika Serikat adalah tempat lahirnya demokrasi liberal.

Berdasarkan data *index democracy* IDM se Asia Tenggara, negara Timor Leste adalah negara demokrasi terbaik, kemudian menyusul Indonesia dalam urutan kedua. Selain timor leste dan Indonesia tidak ada negara asia tenggara yang masuk kategori itu. Jadi Indonesia jauh

lebih demokratis dari negara lain yang ada di asia tenggara.

Greg Fealy menambahkan catatannya, bahwa demokrasi di Indonesia masih memiliki sejumlah persoalan, seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas, sistem partai politik yang semakin lemah, dan juga semakin dikuasai oleh kelompok elit. Di Indonesia dari segi elektoral demokrasi berjalan dengan baik, tetapi dari segi hukum semakin kurang bersahabat, walaupun demokrasi Indonesia menurun tapi masih dalam kategori tetap demokratis. Salah satu gejala politik yang berpengaruh terhadap demokrasi di Indonesia adalah masalah politisasi identitas yang menyebabkan masyarakat terbelah, sehingga kualitas demokrasi sangat tergantung kekuatan politik untuk berkompromi.

Pada subtema kedua terdiri dari lima bab. Pada bagian ini membahas tentang pencapaian tiga unsur penting sistem demokrasi perwakilan, yaitu sistem perwakilan politik, sistem pemilu, serta partai dan sistem kepartaian. Artikel pertama pada subtema kedua ini ditulis oleh Haris, yang mengulas tentang tidak jelasnya kedudukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta dominannya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Haris, DPD sebagai anak kandung reformasi semestinya merupakan kamar kedua parlemen yang memiliki sebagian fungsi legislasi, tetapi faktanya tidak demikian. Sedangkan MPR menurut Haris seharusnya lebih merupakan wadah sidang gabungan antara DPR dan DPD, tetapi lebih merupakan institusi terpisah, sehingga sistem keparlemenan cenderung bersifat trikameral ketimbang bikameral.

Pada bagian kedua dan ketiga subtema kedua, ditulis oleh Lucky Sandra Amalia dan Ridho Imawan Hanafi, mengulas problematika reformasi sistem pemilu legislatif dan sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Dalam konteks pemilihan legislatif (pileg) Amalia berpendapat, bahwa ketika pemilu-pemilu makin bebas dan demokratis, pilihan atas sistem pemilu tidak kunjung menghasilkan wakil-wakil yang lebih amanah dan akuntabel. Meskipun DPR era reformasi jauh lebih baik dari rezim otoriter Orde Baru. Kualitas kinerja dan

<sup>2</sup>Greg Fealy. Speech, Peluncuran dan Bedah Buku “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi”, The Australian National University, Auditorium Gedung Widya Graha LIPI, Lantai 1, September 12, 2019.

akuntabilitas DPR hasil pileg selama dua dekade reformasi, baik secara institusi maupun individu para anggotanya.

Dalam konteks pemilihan presiden (pilpres), Hanafi mengulas kualitas proses kandidasi yang belum sungguh-sungguh merefleksikan upaya serius partai-partai politik mencari pemimpin yang dibutuhkan bangsa Indonesia, hal ini karena para ketua umum parpol seolah-olah langsung bisa menjadi calon presiden, sementara proses seleksi yang berbasis kaderisasi serta kualitas komitmen dan kompetensi kandidat tak kunjung melembaga. Artikel keempat ditulis oleh Lili Romli yang mengulas tentang problematika partai dan sistem kepartaian era reformasi. Romli berpendapat bahwa partai politik belum menjadi institusi publik yang memiliki tanggungjawab atau akuntabilitas terhadap pemilihnya. Kemudian menurut Romli partai politik cenderung oligarkis dalam proses pengambilan keputusan strategis. Keputusan tertinggi biasanya berada pada seseorang atau kelompok kecil elit partai saja. Pada bagian terakhir pada subtema ini ditulis oleh Sri Nuryanti yang mengulas kelembagaan penyelenggara pemilu yang semakin baik tetapi manajemen tata kelola pemilu belum sesuai yang diharapkan.

Menurut Valina Singka Subekti<sup>3</sup> kenapa sudah duapuluh tahun reformasi Indonesia masih saja bergerak dalam posisi elektoral dan prosedural, belum sampai kepada demokrasi substansial yang terkonsolidasi, dikarenakan pada saat amandemen konstitusi (perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat) sebenarnya tidak *by design*, tetapi karena desakan masyarakat saat itu kepada MPR untuk melakukan reformasi konstitusi.

Dari data kinerja DPR dalam dua dekade pasca reformasi, menurut Subekti antara target legislasi dengan hasil realisasi dapat dikatakan sangat rendah. Subekti berpandangan ke depan perlu dibangun sistem pemilu proporsional tertutup dengan memasukkan sistem distrik, supaya wakil rakyat yang dihasilkan lebih representatif, akuntabel, memiliki hubungan

dengan konstituen. Meskipun Indonesia sudah mengadopsi sistem pemilu dengan ukuran daerah pemilihan (dapil) yang kecil dan alokasi kursi yang terbatas, persyaratan peserta pemilu yang lebih ketat, ambang batas yang makin tinggi, serta mengadopsi pemilu serentak tapi masih juga jumlah partai yang masuk ke DPR diatas lima partai.

Menurut Subekti dengan menerapkan sistem proporsional terbuka telah mengharuskan calon legislatif (caleg) dari partai untuk memperkenalkan diri kepada konstituennya, hal tersebut mengharuskan caleg mengeluarkan biayanya yang sangat mahal, mulai rekrutmen calegnya sampai kepada proses tahapan pemilu yang harus dilalui seorang caleg khususnya saat tahap kampanye.

Partai menjadi sangat pragmatis ketika merekrut seorang caleg, jadi tidak lagi bertumpu pada kualitas dari kader-kader. Sebab dalam sistem yang diterapkan sekarang partai lepas tangan, membiarkan caleg bertarung sendiri di dapil. Akibatnya politik transaksionalnya menguat. Terjadi karena adanya kolaborasi, antara penyelenggara pemilu satu sisi, dengan partai pada pihak lain, dan birokrasi pada pihak lain. Jadi posisinya sudah lampu merah, harus segera menyelamatkannya, sebab menunggu reformasi kepartain sangat sulit terlaksana. Upaya untuk memotong permasalahan tersebut menurut Subekti adalah tetap menggunakan sistem proporsional, tetapi proporsional tertutup.

Subtema ketiga berfokus kepada penilaian terhadap pencapaian reformasi hubungan sipil-militer, serta reformasi internal TNI, POLRI, dan Intelijen. Pada subtema ini terdiri dari empat artikel. Artikel pertama dibahas oleh Muhammad Haripin, menurutnya relasi sipil militer di Indonesia berada dalam situasi yang problematis. Kontrol sipil belum dapat diterapkan sepenuhnya meskipun demokratisasi telah berlangsung selama 20 tahun. Haripin mempetakan pola relasi itu sesuai dengan karakter presiden-presiden era reformasi, yakni : periode turbulensi (BJ Habibie), konfrontatif (Abdurrahman Wahid), negosiatif (Megawati), kompromis (SBY), dan kompromis lanjutan (Jokowi).

Artikel kedua ditulis oleh Sri Yanuarti, membahas tentang inkonsistensi implementasi

<sup>3</sup> Valina Singka Subekti. Speech, Peluncuran dan Bedah Buku "Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi", Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Auditorium Gedung Widya Graha LIPI, Lantai 1, September 12, 2019.

reformasi internal TNI, hal ini karena kurangnya kontrol politik DPR terhadap reformasi TNI menuju tentara profesional yang mendukung sistem demokrasi. Artikel ketiga ditulis oleh Sarah Nurani Siregar membahas tentang reformasi internal Polri. Menurut Siregar, upaya menggeser citra Polri yang dulunya militeristik ke arah polisi sipil yang demokratis, profesional, akuntabel, dan independen masih menjadi tantangan dimasa yang akan datang. Artikel terakhir pada subtema ketiga ini ditulis oleh Diandra Megaputri Mengko, membahas dinamika proses reformasi intelijen di Indonesia pasca-Orde Baru. Mengko mengkritisi lemahnya kontrol objektif sipil berdampak pada reformasi struktural intelijen yang cenderung stagnan dan terperangkap pada praktek kultur lama sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Menurut Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo,<sup>4</sup> TNI pada masa reformasi ada pada masa transisi. Reformasi keamanan yang dilakukan adalah penempatan lembaga pelaksana keamanan nasional dalam tugas, peran, kewenangan yang tegas. Reformasi keamanan bukan menyangkut kebijakan tentang hal operasional lembaga pelaksana fungsi keamanan. Untuk posisi politik TNI masa reformasi ada pada posisi absten.

Widjojo berpendapat sebetulnya permasalahan ada pada pengucapan TNI di konstitusi, ada dua dublikasi dalam konstitusi tentang pemaknaan TNI, yaitu pada pasal 10 UUD 1945 yang kemudian dimunculkan lagi pada pasal 30 UUD 1945. Oleh karena itu, reformasi sektor keamanan menurut Widjojo sebenarnya mudah, dengan kembalikan kepada amanat konstitusi sebelum amandemen. Dwifungsi ABRI tidak pernah menjadi amanat konstitusi. Namun demikian masalah yang dihadapi reformasi sektor keamanan tidak bisa dipungkiri cukup besar, misalnya permasalahan jejak pendapat di Timor Timur dan kasus cebongan. Selain hal tersebut, hal yang lebih mendasar yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia menurut Widjojo adalah TNI digerakkan atas instruksi presiden dan tidak pernah di desain sebagai

penegak hukum, yang di desain sebagai penegak hukum adalah kepolisian.

Subtema keempat terdiri dari tiga artikel, fokus pembahasan bagian ini terkait isu reformasi hubungan pusat-daerah melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi luas bagi daerah, pilkada langsung dan demokrasi lokal dalam perspektif gender, dan masalah penyelesaian konflik Papua sejak era Habibie hingga Jokowi.

Artikel pertama pada subtema keempat ditulis oleh Yogi Setya Permana, menurut Permana desentralisasi belum mampu menyelesaikan persoalan kesejahteraan karena meskipun tren pertumbuhan ekonomi terus meningkat dalam satu dekade terakhir, rasio gini memperlihatkan tren kesenjangan sosial-ekonomi yang memburuk. Menurut Permana, faktor penting dibalik realitas ini adalah munculnya fenomena dinasti politik, oligarki dan bos lokal. Sehingga membuat kepemimpinan politik dan sumberdaya dikuasi oleh sekelompok pihak saja. Artikel kedua dibahas oleh Kurniawati Hastuti Dewi, hasil riset Dewi sedikit berbeda dengan Permana, Dewi justru melihat peluang dibalik penyelenggaraan pilkada secara langsung oleh rakyat. Pilkada langsung sejak 2005 tidak hanya membuka stuktur kesempatan yang lebih luas bagi kelompok marginal (perempuan dan minoritas etnis) untuk mengambil peran aktif, tetapi juga pendalam demokrasi lokal.

Artikel terakhir pada subtema terakhir ditulis oleh Aisah Putri Budiatri, mengulas tentang problem penyelesaian konflik Papua yang tak kunjung tuntas. Menurut Budiatri ada empat faktor yang saling berkaitan mengenai penanganan konflik tersebut, yaitu: (1) program kebijakan pemerintahan yang tidak terintegrasi, (2) inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan tanah Papua, (3) kebijakan penyelesaian konflik belum menyentuh akar masalah secara holistik, dan (4) kebijakan pemerintah umumnya tidak mendapat legitimasi yang kuat di Papua, karena proses pembentukannya yang cenderung *top-down*. Oleh karena itu keempat kelemahan ini adalah kunci permasalahan mengapa kebijakan pemerintah sejak 1999 sampai hari ini belum berhasil menyelesaikan konflik Papua.

<sup>4</sup> Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Speech, Peluncuran dan Bedah Buku "Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi", Lembaga Ketahanan Nasional, Auditorium Gedung Widya Graha LIPI, Lantai 1, September 12, 2019.

Menurut Djohermansyah Djohan<sup>5</sup> selama dua dekade reformasi setidaknya ada 10 permasalahan mengenai pemerintahan daerah yang dihadapi Indonesia, yaitu: (1) Tarik-Menarik Kewenangan, (2) Pemekaran Daerah, (3) Korupsi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, (4) Pecah Kongsi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, (5) Politik Dinasti, (6) Politisasi Birokrasi (Aparatur Sipil Negara), (7) Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat kurang efektif, (8) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gagal fungsi, (9) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah bermasalah, (10) Otonomi Khusus tak berjalan dengan baik

Kemudian adapun tiga isu panas politik lokal sepanjang masa reformasi menurut Djohan, yaitu : *Pertama*, reformasi hubungan pusat-daerah (kurang serasi/harmonis), terdiri dari: (a) Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kurang efektif; (b) Daerah tdk taat pada pusat/raja-raja kecil/otonomi kebablasan; (c) Pemerintah pusat tidak solid; (d) Posisi kepala daerah bukan inter pares lagi (forkopimda). Untuk permasalahan pertama Djohermansyah Djohan mengajukan rekomendasi perbaikan kebijakan, sebagai berikut: (a) Pembentukan perangkat gubernur sbg wakil pem.pusat dan didanai dari apbn bukan APBD (lihat UU 23/2014), atau, (b) Untuk mengefektifkan binwas otda baiknya dibentuk pemerintahan regional di 6 pulau besar sebagai representasi pemerintah pusat (gub tdk lagi menjadi wpp).

*Kedua*, pilkada langsung (multi efek), terdiri dari : (a) Efek pada gender (muncul kepemimpinan perempuan di panggung politik lokal), (b) Efek pada ASN (terjadi politisasi birokrasi), (c) Efek dari pecah kongsi (rakyat disuguhi pendidikan politik yang buruk), (d) Efek pada elit lokal (dibajaknya demokrasi lewat politik dinasti). Untuk permasalahan kedua ini Djohermansyah Djohan mengajukan Rekomendasi perbaikan kebijakan, yaitu: (a) Baiknya pilkada dilaksanakan secara asimetris (langsung, tidak langsung, appointed dan penetapan), (b) Pilkada mono eksekutif (cukup

kdh saja, wakil diangkat dari PNS/non PNS sesuai kebutuhan), (c) Politik dinasti tidak dilarang tapi dibatasi (bila kerabatnya maju, petahana wajib cuti), (d) Ada syarat calon kdh/wkdh, memiliki kepekaan gender, (e) Uji publik.

*Ketiga*, konflik Papua (bara tak kunjung padam). Mengenai konflik yang terjadi di Papua, gagalnya pendekatan keamanan, kesejahteraan, dialogis, dan kultural para presiden selama reformasi, menurut Djohan karena: (a) Program kebijakan pemerintah yang tidak terintegrasi, (b) Inkonsistensi kebijakan pemerintah, (c) Kebijakan penyelesaian konflik belum holistik/ belum menyentuh akar masalah konflik, (d) Kebijakan pemerintah untuk Papua tidak mendapat legitimasi yang kuat di Papua, karena proses pembuatannya yang top-down

## Penutup

Dari berbagai penjelasan diatas, dari segi sistematika penulisan, pengorganisasian ide penulis terstruktur dengan baik, terdiri dari empat bagian yang masing-masing saling berkaitan. Pembahasannya tetap pada koridor persoalan-persoalan tantangan demokrasi, dalam skala pemerintahan pusat dan daerah.

Dari segi substansi, buku ini memuat ide dan gagasan demokrasi, pemilu, sistem kepartaian dan partai politik, kelembagaan penyelenggara pemilu pasca reformasi, pertahanan, pemerintahan daerah dan isu gender, serta sejumlah rekomendasi perbaikan. Berbagai rekomendasi yang diberikan berasal dari pemikiran original penulis yang didukung dengan data-data yang baik dan akurat.

Oleh karenanya, secara keseluruhan buku "Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi" sangat layak menjadi referensi untuk memahami persoalan sistem dan pelaksanaan demokrasi pasca reformasi di Indonesia. Serta cocok untuk bahan diskusi untuk para pegiat dan praktisi politik, pemilu, pertahanan dan pemerintah daerah, serta bahan bacaan bagi para civitas academica di kampus-kampus.

<sup>5</sup> Djohermansyah Djohan. Speech, Peluncuran dan Bedah Buku "Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi", Institut Otonomi Daerah, Auditorium Gedung Widya Graha LIPI, Lantai 1, September 12, 2019.

## Daftar Pustaka

- Djohan, Djohermansyah. Speech, Peluncuran dan Bedah Buku “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi”, Institut Otonomi Daerah, Auditorium Gedung Widya Graha LIPI, Lantai 1, September 12, 2019.
- Fealy, Greg. Speech, Peluncuran dan Bedah Buku “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi”, The Australian National University, Auditorium Gedung Widya Graha LIPI, Lantai 1, September 12, 2019.
- Haris, Syamsuddin. *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta: 2019.
- Haris, Syamsuddin. Speech, Peluncuran dan Bedah Buku “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi”, The Australian National University, Pusat Penelitian Politik LIPI, Auditorium Gedung Widya Graha LIPI, Lantai 1, September 12, 2019.
- Singka Subekti, Valina. Speech, Peluncuran dan Bedah Buku “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi”, Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Auditorium Gedung Widya Graha LIPI, Lantai 1, September 12, 2019.
- Widjojo, Letjen TNI (Purn) Agus. Speech, Peluncuran dan Bedah Buku “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi”, Lembaga Ketahanan Nasional, Auditorium Gedung Widya Graha LIPI, Lantai 1, September 12, 2019.

## TENTANG PENULIS

### **Chastiti Mediafira Wulolo**

Afiliasi penulis adalah Universitas Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui email [chastitimw@gmail.com](mailto:chastitimw@gmail.com).

### **Edward Samuel Renmaur**

Afiliasi penulis adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penulis dapat dihubungi melalui email: [3dw4rd5r@gmail.com](mailto:3dw4rd5r@gmail.com).

### **Ferdinand Eskol Tiar Sirait :**

Lahir di Medan, 1 Desember 1974. Menyelesaikan program magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia tahun 2019. Saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: [ferdinand2935@gmail.com](mailto:ferdinand2935@gmail.com).

### **Jerry Indrawan**

Lahir di Jakarta 26 Agustus 1984. Menyelesaikan program sarjana di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta tahun 2010 dan program magister di Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2014. Saat ini aktif mengajar mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan Pengantar Ilmu Politik di Program Studi ilmu Hubungan Internasional di Universitas Paramadina. Juga mengajar Ilmu Hubungan Internasional di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Sudah menerbitkan dua buku berjudul, *Penjajahan Gaya Baru: Konstroversi Seputar Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya* (Mei 2015) dan *Studi Strategis dan Keamanan* (September 2015). Fokus kajiannya adalah demokrasi, militer, pertahanan, keamanan, dan studi perdamaian. Dapat dihubungi melalui email: [jerry.indrawan@paramadina.ac.id](mailto:jerry.indrawan@paramadina.ac.id)

### **M. Prakoso Aji**

Penulis adalah dosen tetap di program ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Gelar magister Ilmu Politik diperoleh dari Universitas Indonesia tahun 2011. Penulis dapat dihubungi melalui email: [prakosoaji@upnvj.ac.id](mailto:prakosoaji@upnvj.ac.id).

### **Muhammad Imam Subkhi**

Penulis adalah mahasiswa magister Program Tata Kelola Pemilu Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Penulis dapat dihubungi melalui email: [Muhammad.imam.subkhi-2018@fisip.unair.ac.id](mailto:Muhammad.imam.subkhi-2018@fisip.unair.ac.id).

### **Moch. Nurhasim**

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas Indonesia. Berbagai kajian seputar kepemiluan, partai politik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: [hasim\\_nur@yahoo.com](mailto:hasim_nur@yahoo.com).

### **Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani**

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan kepemiluan. Penulis dapat dihubungi melalui email: [moulizadonna@gmail.com](mailto:moulizadonna@gmail.com).

### **Muhammad Nuh Ismanu**

Penulis merupakan mahasiswa Program Pascasarjana- Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia. Penulis juga merupakan anggota KPU Kota Bogor. Penulis dapat dihubungi melalui email : ismanu\_nunu@yahoo.com.

### **Sri Yanuarti**

Penulis merupakan Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia, Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru, Beranda Perdamaian, Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan, Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004, dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Kajian kepolisian di antaranya: *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal; Evaluasi Reformasi Polri* dan lain- lain. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis

kajian tentang konflik antara lain: *Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang, Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku; Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas; Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia, dan lain-lain*. Ia dapat dihubungi melalui surel [yanuc2000@yahoo.com](mailto:yanuc2000@yahoo.com).

### **Sutan Sorik**

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Nasional di bidang Pemilu. Gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Penulis dapat dihubungi melalui email: [sutan.sorik98@gmail.com](mailto:sutan.sorik98@gmail.com)

